

# CONTENTIOUS POLITICS GERAKAN AKSI KAMISAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN HAK ASASI MANUSIA

FAUZAN MUFLI

## ABSTRAK

Peliknya pelanggaran HAM di masa lalu menjadi pemantik kelahiran Gerakan Aksi Kamisan pada 18 Januari tahun 2007 dengan awal nama Aksi Diam serta di kenal masyarakat sebagai Aksi Payung Hitam, karena setiap melakukan aksi selalu memakai payung hitam bentuk simbolik perjuangan, perlindungan, dan konsistensi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki *contentious politics* Gerakan Aksi Kamisan dalam memperjuangkan keadilan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksplanatif dan metode penelitian studi kasus. Landasan teoretis penelitian ini mengacu pada teori *contentious politics* oleh Doug Mcadam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly yang menyoroti skema pemenuhan tuntutan akan kebutuhan serta kepentingan yang mengarah pada pembentukan region-region kekuasaan politik berdasarkan garis etnis, agama, kesamaan kepercayaan, atau kesamaan identitas keyakinan inti di antara kelompok-kelompok tersebut. Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer serta studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *contentious politics* menjadi salah satu fenomena Gerakan Aksi Kamisan yang ditandai oleh perseteruan yang melampaui batas-batas politik formal. Dalam memahami pola dan mekanisme dari *contentious politics* dapat menggunakan skema yang mengidentifikasi dan menganalisis *political opportunity structure*, *resource mobilization*, dan *framing process*. Dalam konteks *political opportunity structure* masih masifnya perbedaan pandangan antara lembaga pengadilan, lembaga pengadilan tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor politik penguasa masa lalu yang masih berada di pemerintahan saat ini menyebabkan proses pengadilan terhambat, dan terdapat kurangnya keharmonisan antara masyarakat sipil dan pemerintah. *Framing process* Aksi Kamisan dapat diartikan sebagai sebuah aksi simbolik yang secara konsisten dan berkelanjutan memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. *Resource mobilization* melalui pengumpulan massa dalam Gerakan Aksi Kamisan perlu adanya peningkatan jumlah kehadiran massa aksi yang masih dinilai kurang masif jumlahnya untuk bisa menekan negara agar bisa segera serius dalam menangani penyelesaian masalah HAM berat masa lampau. Faktanya, belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc menjadi indikasi kurangnya *political will* dari Presiden sebagai kepala negara. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai macam upaya mobilisasi yang kuat dari masyarakat sipil, tetapi disisi lain pastinya Gerakan Aksi Kamisan perlu untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan politik dalam menghadapi pemerintah masih menjadi hal yang nyata dalam mencapai tujuan dari pada gerakan ini.

**Kata Kunci** : *contentious politics*, Gerakan Aksi Kamisan, keadilan hak asasi manusia.

# CONTENTIOUS POLITICS THE KAMISAN MOVEMENT IN ADVOCATING FOR HUMAN RIGHTS JUSTICE

FAUZAN MUFLI

## ABSTRACT

*The complexity of human rights violations in the past sparked the birth of the Kamisan Action Movement on January 18 2007 with the initial name Silence Action and known to the public as the Black Umbrella Action, because every time they carry out an action they always wear a black umbrella, a symbolic form of struggle, protection and consistency. This research aims to investigate the contentious politics of the Kamisan Action Movement in fighting for human rights justice in Indonesia. This research uses a qualitative approach with an explanatory type and case study research method. The theoretical basis of this research refers to the theory of contentious politics by Doug Mcadam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly which highlights the scheme of fulfilling demands for needs and interests which leads to the formation of regions of political power based on ethnic, religious, shared beliefs or shared belief identities. core among these groups. The data in this research was obtained using interview techniques as a primary data source and library research as a secondary data source. The research results show that contentious politics is one of the phenomena of the Kamisan Action Movement which is characterized by feuds that go beyond formal political boundaries. In understanding the patterns and mechanisms of contentious politics, you can use schemes that identify and analyze political opportunity structures, resource mobilization, and framing processes. In the context of the political opportunity structure, there are still massive differences in views between judicial institutions, judicial institutions are unable or unwilling to follow up on cases of serious human rights violations involving political actors from past rulers who are still in the current government, causing the court process to be hampered, and there is a lack of harmony between society. civil and government. Framing process of the Kamisan Action can be interpreted as a symbolic action that consistently and continuously fights for the resolution of cases of human rights violations in the past. Resource mobilization through mass gathering in the Kamisan Action Movement requires an increase in the number of demonstrators whose numbers are still considered not massive enough to be able to put pressure on the state to immediately get serious about resolving the serious human rights problems of the past. In fact, the absence of an ad hoc human rights court is an indication of the President's lack of political will as head of state. This situation shows that even though there are various kinds of strong mobilization efforts from civil society, on the other hand, the Kamisan Action Movement's need to resolve political challenges and obstacles in facing the government is still a real thing in achieving the goals of this movement.*

**Keywords :** *contentious politics, Kamisan Action Movement, human rights justice.*

